

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Riyanto (2015), yang meneliti akuntabilitas finansial dalam pengelolaan ADD. Hasilnya adalah Akuntabilitas Finansial dalam Pengelolaan ADD di Kantor Desa Perangat Selatan mulai dari pelaksanaan sampai dengan pencapaian hasilnya dapat dipertanggungjawabkan di depan seluruh pihak Pemerintah Desa, namun belum dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh masyarakat desa. Dari program-program yang dirumuskan terdapat ide dari Pemerintah Desa dan masyarakat desa berupa pembangunan turap jalan, seminisasi jalan dan pembuatan selokan jalan yang pelaksanaanya seimbang tetapi penekanannya pada program yang telah dirumuskan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat belum mampu menjawab semua kebutuhan masyarakat desa karena masih terdapat program yang belum terselesaikan. Adapun faktor penghambatnya antara lain, masih adanya aturan-aturan baru yang muncul di Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Ketua RT, faktor cuaca yang tidak mendukung sehingga kegiatan penyuplai bahan bangunan menjadi terlambat, dan Pemerintah Desa masih belum memaksimalkan pemanfaatan waktu dalam penyusunan laporan dan penyelesaian laporan pertanggungjawaban. Sedangkan faktor pendukungnya adalah masih tingginya tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi dalam kegiatan pembangunan.

Hasil Penelitian Dewi *dkk.* (2015) menunjukkan bahwa ; 1) Sumber pemasukan reguler dadia berasal dari peturunan (iuran wajib), pengampel (iuran

wajib bagi warga dadia di luar Bali), dan pendapatan bunga pinjaman. Sumber pemasukan non reguler dadia berasal dari sumbangan partai politik, danapunia, dan sesari. 2) Alasan dadia Punduh Sedahan tidak membuat laporan keuangan yaitu; transaksi yang tidak rutin terjadi, lingkup organisasi yang kecil, dan kompetensi warga dadia yang kurang. 3) Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan di Dadia Punduh Sedahan dilakukan dengan cara mengumumkan pemasukan dan pengeluaran, serta menempel laporan keuangan sederhana di papan pengumuman dadia.

Azwardi dan Sukanto (2014), yang meneliti efektifitas ADD di Provinsi Sumatera Selatan mengungkapkan bahwa penyaluran dana ADD belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bila dilihat dari jumlah yang disalurkan hingga tahun 2012 belum satupun yang memenuhi ketentuan yang berlaku (minimal 10% dari dana bagi hasil ditambah pajak dikurangi belanja pegawai). peraturan tersebut tidak memberikan sanksi terhadap daerah yang tidak menyalurkan ADD. Bila suatu daerah merasa belum mampu untuk menganggarkan ADD pemerintah provinsi maupun pusat tidak bisa melakukan tindakan (sanksi). Hasil regresi sederhana menunjukkan adanya pengaruh yang negatif antara ADD terhadap tingkat kemiskinan, demikian juga hasil simulasi ADD minimal 10% terhadap tingkat kemiskinan pun menunjukkan hubungan yang negatif. Teknik analisis data yang digunakan, yaitu dengan cara analisis bersifat deskriptif kualitatif dan analisis inferensial, berupa regresi sederhana. Analisis deskriptif kualitatif untuk menjelaskan fakta yang ada dengan menggunakan komparasi dan analisis tren (tabel dan grafik). Sementara metode regresi digunakan untuk menganalisis

keterkaitan antara dana alokasi desa dan kemiskinan. Dalam mengukur kesesuaian ADD anggaran dilakukan dengan membandingkan ADD semestinya dengan realisasinya.

Hasil penelitian Thomas (2013) menunjukkan bahwa pengelolaan ADD dalam pembangunan yang dilaksanakan di Desa Sebawang Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung dan dirangkai dari tahap-tahapan pelaksanaan kegiatan didalam mengalokasikan semua dana desa yang mana dana tersebut berasal dari anggaran alokasi dana desa. Berdasarkan Peraturan Bupati Tana Tidung tentang pengelolaan alokasi dana desa dalam wilayah kabupaten Tana Tidung telah ditetapkan bahwa tujuan dana ADD tersebut untuk 30% pelaksanaannya pada kegiatan belanja aparatur dan operasional dan 70% pelaksanaannya untuk kegiatan belanja publik dan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis di desa Sebawang untuk 30% dari dana ADD bisa berjalan sesuai dengan petunjuknya kemudian untuk yang 70% dari ADD berjalan kurang optimaln karena lebih direalisasikan pada pembangunan fisik pada tahun 2010 dan 2011 sedangkan untuk tahun 2012 lebih kepada pengadaan barang. Rendahnya sumber daya manusia aparat desa dan kurangnya koordinasi tentang pengelolaan ADD menjadi hambatan dalam proses pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Sebawang. Metode yang digunakan penelitian kualitatif dengan cara observasi, wawancara, dokumentasi serta triangulasi.

Hasil penelitian Magdalena *dkk.* (2013) menunjukkan bahwa pengelolaan ADD di Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara berjalan

cukup lancar. Hal ini dapat terlihat dari tahap persiapan berupa Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (RKP Desa) yang dasar penyusunannya adalah aspirasi dari masyarakat desa langsung melalui Musrenbang, baik dari tingkat dusun tingkat Desa dan tingkat kecamatan mengenai kebutuhan pembangunan, penyelesaian setiap kegiatan sampai dengan tahap penyusunan pertanggungjawaban. Sehingga pencapaian tujuan Alokasi Dana Desa sudah optimal. Namun indikasi tujuan untuk meningkatkan partisipasi swadaya gotong – royong masyarakat justru mengalami penurunan yang disebabkan oleh alokasi dana pembangunan desa di Kecamatan Tenggarong Seberang bukan hanya bersumber dari ADD, namun juga bersumber dari dana APBD, PNPM, Comdev dan CSR dari perusahaan perusahaan tambang yang berlokasi di Kecamatan Tenggarong Seberang. Sehingga swadaya masyarakat hanya bersifat kegiatan gotong – royong dalam proses realisasi pembangunan, dalam bentuk tenaga dan material sebagai pelengkap realisasi tersebut.

Hasil penelitian (Purwitasari *dkk.*, 2013) menunjukkan Kinerja keuangan Desa Slemanan pada tahun anggaran 2009-2011 berdasarkan analisis sumber dan penggunaan dana menunjukkan kinerja keuangan yang masih dapat dikategorikan cukup baik, namun belum dalam kondisi yang cukup stabil dalam memperoleh sumber dana. Hal tersebut terlihat bahwa kontribusi PADesha pada tahun anggaran 2009 terhadap total pendapatan desa hanya sebesar 33,49%, dimana kontribusi terbesarnya berasal dari dana perimbangan keuangan pusat yaitu dari komponen Bantuan Alokasi Dana Desa (ADD).

Landasan Teori

1. Alokasi Dana Desa (ADD)

Peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 72 tahun 2005 tentang desa, Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Bab IX pasal 18 disebutkan bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) adalah salah satu bentuk transfer dana dari pemerintah yang telah ditetapkan sebesar 10 % dari dana perimbangan pemerintah pusat dan daerah yang diterima oleh masing-masing kabupaten/ kota.

Sumber Alokasi Dana Desa (ADD) dalam pasal 3 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa adalah : (1.)Bagian dari penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten (2.)Bagian dari dana perimbangan (non DAK) yang diterima oleh kabupaten.

Pasal 9 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa: Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) menyebutkan : (1) Alokasi Dana Desa (ADD) digunakan untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat.(2) Alokasi Dana Desa (ADD) yang digunakan untuk penyelenggaraan pemerintaha desa sebesar 30% dari jumlah ADD yang diterima (3) Alokasi Dana Desa (ADD) yang digunakan untuk pemberdayaan masyarakat adalah sebesar 70% dari jumlah ADD.

Pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, mengenai pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) : (1) Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan salah satu sumber pendapatan desa (2) Besaran ADD dituangkan dalam peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) (3) Kepala desa sebagai pemegang kekuasaan keuangan desa dan bertanggungjawab atas pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.

Pasal 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, mengatur pelaksanaan pengelolaan ADD dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali. Setiap penerimaan dan pengeluaran dana dari Alokasi Dana Desa (ADD) dicatat dalam buku kas pembantu sesuai ketentuan yang berlaku, secara teknis dilakukan oleh bendahara desa.

Dalam bab 10 pasal 15 ayat 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, mengatur Pelaporan dan pertanggungjawaban : (1) Laporan berkala, laporan mengenai pelaksanaan pengukuran dana ADD dibuat secara rutin tiap bulannya, laporannya adalah realisasi penerimaan ADD dan realisasi pengeluaran ADD (2) Laporan akhir dari penggunaan ADD mencakup perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana, masalah yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaian akhir penggunaan ADD.

2. Akuntabilitas

Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan

mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Akuntansi publik terdiri atas dua macam, yaitu : (1) akuntabilitas vertikal (vertical Accountibilty), dan (2) akuntabilitas horisontal (horizontal accountability). Pertanggungjawaban vertikal (vertical Accountibilty) adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban unit-unit kerja (dinas) kepada pemerintah daerah, pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, dan pemerintah pusat kepada MPR. Pertanggungjawaban horisontal (horizontal accountibilty) adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas (Mardiasmo, 2002).

Dalam Undang-undang Republik Indonesia nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotismemenjelaskan bahwa yang dimaksud asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tujuan utama dari konsep akuntabilitas adalah untuk mengetahui pertanggungjawaban tim pelaksana pengelolaan alokasi dana desa (ADD) kepada masyarakat, dimana kepala desa sebagai penanggungjawab utama.

Dalam menilai kinerja keberhasilan pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa yang akuntabilitas dapat digunakan beberapa indikator yang telah disesuaikan dalam Permendagri No.113 Th.2014 sebagai berikut:

- a. Pada tahap proses Perencanaan beberapa indikator untuk menjamin akuntabilitas adalah:
 1. Desa memiliki bukti tertulis dalam membuat keputusan dan tersedia bagi warga (daftar hadir, surat pernyataan (kesepakatan desa dan warga), hasil notulen).
 2. Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan dan menyampaikan kepada Kepala Desa.
- b. Pada tahap proses Pelaksanaan beberapa indikator untuk menjamin akuntabilitas adalah:
 1. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.
 2. Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.
- c. Pada tahap proses Penatausahaan beberapa indikator untuk menjamin akuntabilitas adalah:
 1. Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.
 2. Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.

- d. Pada tahap proses Pelaporan beberapa indikator untuk menjamin akuntabilitas adalah:

Desa melaporkan laporan pertanggungjawaban keuangan desa tepat waktu atau sesuai periode.

- e. Pada tahap proses Pertanggungjawaban beberapa indikator untuk menjamin akuntabilitas adalah:

Kegiatan yang didanai sesuai dengan yang telah direncanakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

3. Transparansi

Menurut Mardiasmo (2004:30), transparansi berarti keterbukaan (openness) pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi.

Standar Akuntansi Pemerintah menjelaskan bahwa transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

Mardiasmo (2006), menyebutkan anggaran yang disusun oleh pihak eksekutif dikatakan transparansi jika memenuhi beberapa kriteria berikut :

1. Terdapat pengumuman kebijakan anggaran.
2. Tersedia dokumen anggaran dan mudah diakses.

3. Tersedia laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu.
4. Terakomodasinya suara/usulan rakyat.
5. Terdapat sistem pemberian informasi kepada publik.

Menurut Permendagri No. 113 Th. 2014 dalam laporan keuangan daerah harus transparan sesuai dengan peraturan seperti berikut:

1. Desa menginformasikan jumlah dana ADD yang diterima pada saat Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan).
2. Tersedianya laporan pertanggungjawaban mengenai pengelolaan alokasi dana desa (ADD) yang dengan mudah diakses masyarakat.
3. Desa terbuka mempublikasikan/mengumumkan saat Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) tentang kebijakan mengenai pengelolaan Alokasi Dana Desa.
4. Terdapat sistem pemberian informasi kepada publik mengenai program dari ADD (papan pengumuman).
5. Tersedianya sarana untuk suara dan usulan masyarakat
6. Adanya kerjasama untuk meningkatkan arus informasi dengan media masa dan lembaga non pemerintah.

4. Konsep Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 113 Tahun 2014

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Selanjutnya Pengelolaan Keuangan

Desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.

1. APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa, yang terdiri dari:

- a) Pendapatan Desa;
- b) Belanja Desa; dan
- c) Pembiayaan Desa.

Pendapatan Desa diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis. Belanja Desa diklasifikasikan menurut kelompok, kegiatan, dan jenis. Pembiayaan diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis.

Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa.

- a. Pendapatan Desa:
 - ✓ Pendapatan Asli Desa (PADes);
 - ✓ Transfer; dan
 - ✓ Pendapatan Lain-Lain.
 - ✓ Kelompok PADes, terdiri atas jenis:
- b. Hasil usaha;
 - ✓ Hasil aset;
 - ✓ Swadaya, partisipasi dan Gotong royong; dan
 - ✓ Lain-lain pendapatan asli desa.

- c. Hasil usaha desa:
 - Hasil Bumdes
 - Tanah kas desa.
- d. Hasil aset
 - Tambatan perahu
 - Pasar desa
 - Tempat pemandian umum,
 - Jaringan irigasi.
- e. Swadaya, partisipasi dan gotong royong adalah membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat berupa :
 - Tenaga
 - barang yang dinilai dengan uang.
 - Lain-lain pendapatan asli desa : hasil pungutan desa.
- f. Kelompok transfer, jenis:
 - Dana Desa; Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
 - Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten/Kota dan Retribusi Daerah;

- Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/kota setelah dikurangi dana alokasi khusus.
- Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus
- Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi; dan
- Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota.

Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota dapat bersifat umum dan khusus. Bantuan Keuangan bersifat khusus dikelola dalam APBDesa tetapi tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling sedikit 70% dan paling banyak 30%.

- g. Kelompok pendapatan lain-lain, jenis:
 - Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat;
 - Lain-lain pendapatan Desa yang sah.
- h. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat adalah pemberian berupa uang dari pihak ke tiga.

2. Belanja Desa

Belanja desa meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa.

- a) Klasifikasi Belanja Desa, kelompok:
 1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 2. Pelaksanaan Pembangunan Desa;

3. Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
 4. Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
 5. Belanja Tak Terduga.
- b) Kelompok belanja dibagi dalam kegiatan sesuai dengan kebutuhan Desa yang telah dituangkan dalam RKPDesa. Kegiatan terdiri atas jenis belanja:
1. Pegawai;
 2. Barang dan Jasa; dan
 3. Modal.
 4. Jenis belanja pegawai.
- c) Pengeluaran penghasilan tetap dan tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa. Belanja Pegawai dianggarkan dalam :
1. kelompok Penyelenggaraan Pemerintahan Desa,
 2. kegiatan pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan.
 3. Belanja pegawai pelaksanaannya dibayarkan setiap bulan.
- d) Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan. Belanja barang/jasa antara lain:
1. alat tulis kantor;
 2. benda pos;
 3. bahan/material;
 4. pemeliharaan;
 5. cetak/penggandaan;
 6. sewa kantor desa;

7. sewa perlengkapan dan peralatan kantor;
8. makanan dan minuman rapat;
9. pakaian dinas dan atributnya;
10. perjalanan dinas;
11. upah kerja;
12. honorarium narasumber/ahli;
13. operasional Pemerintah Desa;
14. operasional BPD;
15. insentif Rukun Tetangga /Rukun Warga; dan
16. pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat.

3. Pembiayaan Desa

Pembiayaan Desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

- a. Pembiayaan Desa, kelompok:
- b. Penerimaan Pembiayaan; dan
- c. Pengeluaran Pembiayaan.
- d. Penerimaan Pembiayaan, mencakup:
- e. Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya;
- f. Pencairan Dana Cadangan; dan
- g. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.

Menurut Permendagri No. 113 Th. 2014 Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan

tertib dan disiplin anggaran. Pengelolaan keuangan desa, dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan:

- a) menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;
- b) menetapkan PTPKD dari unsur perangkat desa yaitu Sekreraris, Kepala Seksi, dan Bendahara.
- c) menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
- d) menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa;
- e) melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa diterbitkan menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 106 Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sehingga perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Maka untuk melaksanakan peraturan tersebut pemerintah desa harus mempersiapkan dan mulai memperbaiki tentang laporan Pengelolaan Keuangan Desa agar sesuai dengan peraturan tersebut.

Menurut Permendagri No 113 Th. 2014 pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Pemegang kekuasaan pengelola keuangan desa adalah Kepala Desa atau sebutan lain yang karena

jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.

Pada pasal 20 Permendagri No 113 tentang perencanaan menjelaskan bahwa:

1. Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan.
2. Sekretaris Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa.
3. Rancangan peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama.
4. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disepakati bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.

Selanjutnya pada pasal 24 menyebutkan tentang pelaksanaan pengelolaan keuangan:

1. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.
2. Khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.
3. Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

Penatausahaan Pasal 35 (1) Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa. (2) Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. (3) Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban. (4) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Pada saat Pelaporan Pemerintah Desa wajib mematuhi Pasal 37 bahwa:

1. Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota berupa:
 - a. laporan semester pertama; dan
 - b. laporan semester akhir tahun.
2. Laporan semester pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa laporan realisasi APBDesa.
3. Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.
4. Laporan semester akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

Saat pertanggungjawaban laporan keuangan Pemerintah Desa harus memenuhi kriteria yang sesuai dengan Peraturan pada Pasal 38 bahwa:

1. Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran.
2. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
3. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
4. Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri:
 - a. format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran berkenaan;
 - b. format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan; dan
 - c. format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa.

Pasal 39 Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 bahwa:

1. Merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Pasal 40 (1) Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 7 dan 3 8 diinformasikan kepada masyarakat

secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.

2. Media informasi sebagaimana dimaksud antara lain papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi.

4.Struktur Tim Pengelola Keuangan Tingat Desa

Menurut Permendagri No. 113 Th. 2014 Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Pengelolaan keuangan desa, dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan:

- a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;
- b. menetapkan PTPKD dari unsur perangkat desa yaitu Sekreraris, Kepala Seksi, dan Bendahara.
- c. menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
- d. menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa;
- e. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa.

Dalam Pengelolaan keuangan Desa Kepala Desa dibantu oleh Tim Pelaksana yang terdiri dari perangkat Desa, seperti dalam Permendagri No. 113 Th. 2014 BAB III pasal 4, Tim Pengelola Keuangan Desa merupakan:

1. Kepala Desa
2. Sekretaris Desa

3. Bendahara Desa

4. Kepala Seksi.

Tugas-tugas Tim Pengelola Keuangan Desa tersebut:

1. Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa mempunyai kewenangan:
 - a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;
 - b. Menetapkan PTPKD;
 - c. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
 - d. Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa;
 - e. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa.
2. Sekretaris Desa selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa tugas dari Sekretaris Desa yaitu:
 - a. Menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBDesa;
 - b. Menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa;
 - c. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa;
 - d. Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa;
 - e. Melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa.

3. Bendahara mempunyai tugas menerima, menyimpan, menyetor/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.
4. Kepala Seksi mempunyai tugas:
 - a. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya;
 - b. Melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga KemasyarakatanDesa yang telah ditetapkan di dalam APBDesa;
 - c. Melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas bebananggaran belanja kegiatan;
 - d. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - e. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa;
 - f. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

